

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2011-2018

Oleh: Rohadin¹, Arief Nurcahyo²

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Kota Cirebon, yaitu berupa data Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2011-2018.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kota Cirebon, sebesar 85,5909%.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

¹ Dosen Tetap UNTAG Cirebon, email: rohadin17845@untagcirebon.ac.id

² Pegawai BPS Kota Cirebon, email: ariefn@bps.go.id

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berbagai kebijakan dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara umum.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan fiskal juga diharapkan mampu membuka lebar kesempatan kerja yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menekan kemiskinan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai pada Januari 2001 bagi setiap daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memuat dua aspek penting, yaitu pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah maupun tugas pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang meliputi penggalan sumber-sumber penerimaan dan pengalokasian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah baik lokal, regional, nasional maupun global.

Pengeluaran pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang tercermin dalam APBD dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik. Dari dua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah merupakan jenis pengeluaran

yang dominan dalam pengeluaran pembangunan di sebagian besar di daerah baik di Kota Cirebon maupun di sebagian besar daerah di Indonesia. Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman beserta bunga dan subsidi. Semua jenis pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pengeluaran konsumsi. Sedangkan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik terbagi menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi tersebut di atas diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.1. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2011 – 2018

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2011	420.108
2012	325.549
2013	462.774
2014	516.820
2015	709.021
2016	929.460
2017	770.928
2018	792.958

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon (Dalam Persen) Tahun 2011-2018

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2011	5,23
2012	5,46
2013	4,96
2014	5,07
2015	4,88
2016	5,63
2017	5,06
2018	5,02

Sumber: BPS Kota Cirebon

Berdasar table diatas bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan berdampak maksimal terhadap output atau pertumbuhan ekonomi bila tidak terjadi inefisiensi pengeluaran pemerintah. Inefisiensi pengeluaran pemerintah antara lain disebabkan oleh adanya komponen pengeluaran pemerintah yang tidak produktif. Pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan yang merupakan pengeluaran produktif menurut studi Ramirez *et. al.* (1998) selain berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berdampak positif terhadap pembangunan manusia yang diaktualisasikan dalam pengentasan kemiskinan . Dampak positif ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas modal manusia. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini akan lebih membaik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebetulnya terdapat hubungan.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pembangunan Kota Cirebon dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator utama keberhasilannya adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi pembangunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa sektor andalan pembangunan adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.3. Tingkat Kemiskinn di Kota Cirebon (Dalam Persen)
Tahun 2011-1018

Tahun	Kemiskinan (dalam %)
2011	11,56
2012	11,08
2013	10,54
2014	10,03
2015	10,36
2016	9,73
2017	9,66
2018	8,88

Sumber: BPS Kota Cirebon

Dimensi kemiskinan dibentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, tingkat kemiskinan Kota Cirebon sejak tahun 2011 hingga 2018 mengalami trend yang menurun. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan pemerintah Kota Cirebon dalam menanggulangi kemiskinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengeluaran pemerintah yang berpihak pada sektor-sektor produktif sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Bertitik tolak pada hal tersebut, penulis bermaksud untuk memberi judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah uraikan diatas, maka dengan demikian bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam *me-manage* kebijakan fiskalnya selama periode 2011-2018 dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Anggaran Belanja Pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini belanja pemerintah Kota Cirebon, setiap tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian, Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1. Kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah.

Beberapa hal yang disebutkan di atas terlihat ada keterkaitan erat dan positif antara belanja pemerintah daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon. Secara teori, pengeluaran pemerintah terutama belanja barang dan jasa dan belanja modal baik termasuk dalam belanja ekonomi maupun belanja sosial, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi.

1.3. Perumusan Masalah

Seperti apa yang diuraikan pada identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara parsial pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018 ?

2. Bagaimana pengaruh secara simultan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018.
2. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh secara simultan pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018 ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Kajian Penelitian yang Relevan

Rohadin 2013, Disertasi, “Pengaruh kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda, infrastruktur dan investasi terhadap pembangunan ekonomi desa pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat di Kota dan Kabupaten Cirebon”, Universitas Borobudur Jakarta, dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Faktor alokasi anggaran pemda, infrastruktur dan investasi berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap pembangunan ekonomi desa dengan bobot pengaruh cukup kuat, tetapi secara parsial pembangunan ekonomi desa lebih dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran
2. Faktor pembangunan ekonomi desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan
3. Faktor penciptaan lapangan pekerjaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan masyarakat.

Merry Anitasari, Ahmad Soleh, 2013, Jurnal “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bengkulu”, dalam Ekombis Review,. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17 % per tahun.

2. Dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bengkulu dikategorikan sebagai daerah yang baru membangun yang merupakan hasil pemekaran pasca pemberlakuan otonomi daerah. Sehingga dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah dianggap belum mampu menstimulus kegiatan sektor-sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

2.1.2 Pengertian Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Menurut fungsi pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan belanja untuk fungsi perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis kegiatan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak

langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan anggaran belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tiadanya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah yang bersifat umum.

2.1.3 Pengertian Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan kapasitas penawaran atau produksi barang dan jasa yang berdasarkan pada peningkatan teknologi, penyesuaian ideologi dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sedangkan Pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan dan alokasi sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Todaro, 2000).

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan bukan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Sedangkan menurut Bachtiar Chamsyah (2006) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan

kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari definisi diatas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak.

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah) dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Secara sederhana dan umumnya ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

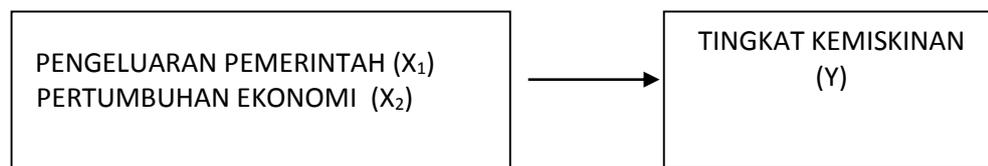
3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan secara singkat konsep dan definisi mengenai peranan pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan uraian tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan permasalahan mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terutama dimaksudkan untuk mengkaji berbagai metodologi yang ada untuk kemudian dirujuk dan diadaptasi menjadi model yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- Ho Tidak terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018.”
- Ha Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018.”:

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Metode ini digunakan dengan pertimbangan, mampu memberikan kejelasan hubungan dan besaran pengaruh antar variabel penelitian

1. Variabel Penelitian

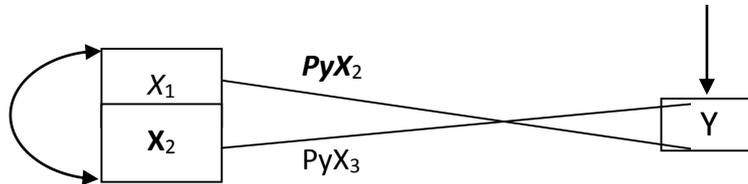
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pengeluaran pemerintah (X_1), Pertumbuhan ekonomi (X_2) merupakan variabel yang fungsinya sebagai variabel bebas. Sedangkan Tingkat kemiskinan (Y) adalah variabel yang berfungsi sebagai variabel terikat.

2. Instrumen Penelitian

Dalam mengumpulkan data bagi keperluan penelitian digunakan alat ukur berupa data sekunder, yaitu kumpulan data-data tentang pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan selama tahun 2011

sampai 2018 (time series) ditetapkan yaitu variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (variabel bebas) dan tingkat kemiskinan (variabel terikat).

Gambar 3.1. Struktur Analisis Jalur



Keterangan :

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = Pertumbuhan Ekonomi

Y = Tingkat kemiskinan

ε = Variabel lain yang mempengaruhi Y

Data yang terkumpul dianalisis hubungan kausalnya antara variabel. pada gambar di atas memperlihatkan Pengeluaran pemerintah (X_1), Pertumbuhan ekonomi (X_2) merupakan variabel yang fungsinya sebagai variabel bebas. Sedangkan Tingkat kemiskinan (Y). Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam pengujiannya menggunakan analisis jalur dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Membuat persamaan struktural yaitu :

$$Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX2}X_2 + \varepsilon$$

(2) Menghitung korelasi antara variabel bebas X_1 serta korelasi antar variabel bebas X_1 dengan variabel terikat Y .

$$r_{X_i X_j} = \frac{\sum X_i X_j - 1/n(\sum X_i)(\sum X_j)}{[\sum X_i^2 - 1/n(\sum X_i)^2] [\sum X_j^2 - 1/n(\sum X_j)^2]}$$

$$r_{X_i Y} = \frac{\sum X_i Y - 1/n(\sum X_i)(\sum Y)}{[\sum X_i^2 - 1/n(\sum X_i)^2] [\sum Y^2 - 1/n(\sum Y)^2]}$$

(3) Menyusun matriks korelasi antar variabel bebas X_i serta vector korelasi antar variabel bebas X_i dengan Y .

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & r_{X_1X_1} & r_{X_1X_2} \\ & 1 & r_{X_2X_2} \end{pmatrix} \quad R_y = \begin{pmatrix} r_{X_1Y} \\ r_{X_2Y} \end{pmatrix}$$

(4) Menghitung matriks invers (kebalikan) dari R_x :

$$R_x^{-1} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ & C_{22} & C_{23} \\ & & C_{33} \end{pmatrix}$$

(5) Menghitung koefisien jalur P_{Yxi}

$$P_{Yxi} = R_x^{-1} R_y ; i = 1, 2, 3$$

$$P_{Yxi} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ & C_{22} & C_{23} \\ & & C_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{X_1Y} \\ r_{X_2Y} \\ r_{X_3Y} \end{pmatrix}$$

(6) Menghitung koefisien determinasi $R^2_y (X_1, X_2, X_3)$ yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total X_1, X_2 terhadap Y yaitu :

$$R^2_y (X_1, X_2, X_3) = \sum_{i=1}^3 P_{Yxi} r_{X_iY}$$

(7) Menghitung pengaruh variabel lain diluar X_i yaitu :

$$P_{Y\epsilon} = \sqrt{1 - R^2_y (X_1, X_2, X_3)}$$

(8) Menguji koefisien jalur secara simultan dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{(n-k-l)R^2_y (X_1, X_2, X_3)}{K [(1-R^2_y (X_1, X_2, X_3))]}$$

$$\text{Bila } F \begin{cases} \leq F_{\alpha} ; \{ k ; n-k-l \} \rightarrow \text{terima } H_0 (n,s) \\ > F_{\alpha} ; \{ k ; n-k-l \} \rightarrow \text{tolak } H_0 (s) \end{cases}$$

(9) Menguji secara parsial melalui uji t

$$t_i = \frac{P_y X_i}{\sqrt{\frac{[(1-R^2_y (X_1, X_2, \dots))}{n-k-l}}}}$$

Keputusan / Kriteria Uji :

$$\text{Bila } t \begin{cases} \leq t_{\alpha} ; \{ k ; n-k-1 \} & \rightarrow \text{terima } H_0 \\ > t_{\alpha} ; \{ k ; n-k-1 \} & \rightarrow \text{tolak } H_0 \end{cases}$$

Dengan formula hipotesis :

a. $H_0 : P_y X_1 = 0$ vs $H_1 : P_y X_1 > 0$

b. $H_0 : P_y X_2 = 0$ vs $H_1 : P_y X_2 > 0$

c. $H_0 : P_y X_3 = 0$ vs $H_1 : P_y X_3 > 0$

(10) Menghitung pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*)

a. Pengaruh langsung

$$Y \longleftarrow X_1 \longleftarrow Y = (P_{yxi})^2$$

b. Pengaruh tidak langsung

$$Y \longleftarrow X_1 \Omega X_j \longleftarrow Y = P_{yxi} r_{xixj} P_{yxj}$$

c. Besarnya pengaruh total yaitu :

$$(P_{yxi})^2 + P_{yxi} r_{xixj} P_{yxj}$$

IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon, dengan persamaan sebagai berikut:.

$$Y = a + b\chi_1 + b\chi_2 + \mu$$

Dimana :

- Y = Tingkat kemiskinan (dalam persen)
 χ_1 = Pengeluaran pemerintah (dalam juta rupiah)
 χ_2 = Pertumbuhan ekonomi (dalam persen)
a = Konstanta regresi
b = Koefisien regresi
 μ = Term error

Model persamaan yang dihasilkan tersebut akan dipakai untuk membahas pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinn di Kota Cirebon. Periode waktu yang digunakan (time series) adalah tahun 2011 sampai tahun 2018, dengan menggunakan program aplikasi Eviews 7.0.

Dari hasil penghitungan dari ketiga variabel diatas didapat:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/27/19 Time: 21:56
Sample: 2011 2017
Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.400356	0.085235	-4.697105	0.0093
X2	0.359765	0.317253	1.133999	0.3201
C	10.57758	1.365771	7.744763	0.0015
R-squared	0.865709	Mean dependent var		10.00000
Adjusted R-squared	0.798563	S.D. dependent var		0.816497
S.E. of regression	0.366457	Akaike info criterion		1.127658
Sum squared resid	0.537164	Schwarz criterion		1.104477
Log likelihood	-0.946804	Hannan-Quinn criter.		0.841141
F-statistic	12.89303	Durbin-Watson stat		2.382264
Prob(F-statistic)	0.018034			

Berdasarkan hasil model estimasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut : bahwa pengeluaran pemerintah (X_1) mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon. Hal ini bisa dilihat dari koefisien X_1 (-0,400356). Artinya apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan di Kota Cirebon turun sebesar 0,400356%. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon dengan besar koefisien 0,359765. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan di Kota Cirebon naik sebesar 0,359765%.

a) Uji t (Uji Parsial)

Uji t merupakan pengujian secara individual untuk membuktikan bahwa koefisien regresi ini secara statistik signifikan.

- H_0 = tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan
- H_a = ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan
- H_0 = tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan
- H_a = ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

Kriteria penerimaan atau penolakan sebagai berikut :

- Tolak H_0 jika nilai probabilitas $t <$ dari taraf signifikan sebesar 0,05 (sig $<$ 0,05)
- Terima H_0 jika nilai probabilitas $t >$ dari taraf signifikan sebesar 0,05 (sig $>$ 0,05)

Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa nilai probabilitas (sig) untuk pengeluaran pemerintah sebesar 0,0093 (sig 0,0093 $<$ 0,05) dengan demikian H_0 ditolak yang artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian nilai probabilitas (sig) untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3201 (sig 0,3201 $>$ 0,05) dengan demikian H_0 diterima yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Atau dengan kata lain pengaruhnya kurang bermakna. Sementara nilai koefisien C sebesar 10,57758, artinya ketika variabel pengeluaran pemerintah (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) mempunyai nilai yang sama dengan nol (0) maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 10,57758 %.

b) Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

Dari hasil regresi pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan tahun 2011-2018 di Kota Cirebon secara simultan (bersama-sama) diperoleh nilai R^2 sebesar 0,865709. Artinya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah (X_1) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) sebesar 86,5709%, sedangkan sisanya sebesar 14,4291 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

c) Uji Simultan

Uji Simultan digunakan untuk melihat apakah variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,018034 (sig 0,018034 < 0,05), artinya kedua variabel independen tersebut (pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dependen (tingkat kemiskinan).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa pengaruh kontribusi pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan serta dengan mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada, maka disusun simpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Simpulan

1. Belanja ekonomi pemerintah daerah berdampak positif terhadap kemiskinan di Kota Cirebon. Untuk setiap satu persen peningkatan belanja ekonomi, tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,400356%.
2. Disisi lain pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang kurang bermakna terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon. Untuk setiap satu persen peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0,359765%.
3. Secara simultan pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon sebesar 86,57 %, sedangkan sisanya sebesar 14, 43 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

5.2. Saran-Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan penulis, beberapa saran yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran belanja pemerintah Kota Cirebon seyogyanya ditingkatkan efisiensinya agar lebih efektif agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara optimal.
2. Peningkatan belanja daerah sebaiknya difokuskan pada peningkatan belanja yang langsung berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Cirebon.
3. Porsi belanja lainnya terutama belanja fungsi pelayanan publik yang merupakan belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan dan tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat secara umum sebaiknya ditekan agar tersedia dana yang lebih besar untuk belanja ekonomi dan belanja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anitasasri Merri, Soleh Ahmad, 2014. *Pengaruh pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonom di Propinsi Bengkulu* Journal of Business Economy.

Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2011-2018. *Kota Cirebon Dalam Angka 2011-2018*. Cirebon: BPS

_____, 2011-2018. *PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2011-2018*. Cirebon: BPS

Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2010-2018. *Pemerintah Kota Cirebon 2010-2018*. Cirebon: BKD

Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Ekonometrika: Analsis ekonometrika dan Statistik dengan Menggunakan Eviews*. Yogyakarta: YPP STIM YKPN.